



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel News
- Rakyat Pos
- Babel Pos
- Radar Bangka
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				✓																				

Serahkan LHP ke Pemprov dan Pemkot

BPK Berikan 19 Rekomendasi



KEPALA BPK BABEL, Arif Agus menyerahkan LHP kepada Plt Gubernur Yuswandi A. Temenggung.

FOTO: IST

PANGKALPINANG - Bangka Belitung menyerahkan dua Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Kinerja kepada Pemerintah

Provinsi (Pemprov) Babel. BPK juga menyerahkan LHP kepada Pemerintah Kota (Pemkot) Pangkalpinang di kantor BPK Babel, Kamis (15/12). Kedua laporan yang diserahkan tersebut yaitu LHP Kin-

erja Atas Efektifitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan

• Baca | **BPK** ... | Hal 6



KLIPING

BPK RI PERWAKILAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

Media cetak:

- Bangka Pos
- Babel Pos
- Babel News
- Radar Bangka
- Rakyat Pos
- Lainnya: _____

Tanggal:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	✓

Bulan:

1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12
				✓	

Thn:

2
0
1
6

Halaman:

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	
				✓																				

BPK...

BUMD Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016 dan LHP Kinerja Atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2014 sampai dengan 2016.

Laporan BPK tersebut diserahkan Kepala BPK Babel, Arif Agus yang diterima oleh Wakil Ketua DPRD Babel, Deddy Yulianto dan Plt Gubernur Yuswandi A. Temenggung. Sementara itu pihak Kota Pangkalpinang diterima oleh Ketua DPRD Kota Pangkalpinang, Marsyahbana dan Plt Walikota Pangkalpinang, Muhammad Sopian. Terkait dengan dua LHP Kinerja yang diterima Pemprov Babel, Yuswandi A. Temenggung dalam tanggapannya menyampaikan terimakasih kepada pihak BPK Babel yang telah melakukan pemeriksaan atas kinerja dan aktivitas yang dilakukan oleh Pemprov Babel dalam melaksanakan programnya.

"Dari awal proses hingga diperolehnya pemeriksaan ini tentunya dilaksanakan komunikasi yang telah dilakukan dalam rangka betul-betul memahami bersama, apa kinerja enitasnya ujarnya.

Menurut Yuswandi, dengan adanya pemeriksaan dan hasilnya ini dapat meningkatkan kinerja dan tata kelola di Pem-

prov. Tentunya kedua hasil pemeriksaan ini menjawab atas kebutuhan bahwa Harjesok akan lebih baik daripada hari ini, ungkapnya.

Yuswandi menambahkan Pemprov telah menyiapkan dan menyusun rencana aksi atas hasil laporan ini, yang sesegera mungkin dilaksanakan dan akan kita kawal terus sehingga target-target dalam penyelesaian ini dapat tercapai pada waktunya. Sementara itu Kepala BPK Babel, Arif Agus dalam sambutannya menyampaikan, BPK sebagai Lembaga Negara dibentuk untuk melaksanakan tugas sebagai pemeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dan menyampaikannya kepada Lembaga Perwakilan sebagai penggunaannya.

"Semua ini ditujukan untuk mendorong transparansi dan akuntabilitas keuangan negara dalam rangka penegakan good governments yang merupakan modal utama bagi terciptanya demokrasi politik dan ekonomi yang sesungguhnya terangnya.

Lanjutnya berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 15 tahun 2004 BPK diberi kewenangan untuk memberikan tiga jenis pemeriksaan yaitu pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Berdasarkan hal terse-

dari Halaman 5

but, menurutnya BPK Babel telah melaksanakan pemeriksaan kinerja pada Pemprov dan Pemkot Pangkalpinang yaitu Pemeriksaan Kinerja Atas Efektivitas Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah dan Pembinaan BUMD.

"Terdapat 9 rekomendasi yang perlu menjadi perhatian dalam Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah, serta 10 rekomendasi pada Tata Kelola Pemerintah Daerah Dalam Pembinaan BUMD," jelasnya.

Arif Agus berharap agar Pemprov dan Pemkot Pangkalpinang dapat menindaklanjuti rekomendasi dan memberikan jawaban atau penjabaran kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi, selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah LHP tersebut diterima sesuai dengan Undang-undang yang berlaku. Selain para pejabat yang menerima hasil laporan tersebut, juga hadir Sekretaris Daerah Babel, Yan Megawandi Sekda Pangkalpinang, Ratmida Dawam, Inspektur Babel Hariyoso, Inspektur Kota Pangkalpinang, M. Nasir, serta sejumlah pejabat di lingkungan Pemprov dan Pemkot Pangkalpinang serta BPK Babel. (bai)